

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana. Jakarta.
- , 2020. *Kepemerintahan Yang Bertanggungjawab Melalui Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan*, Phinatama Media. Makassar.
- Anwar (Etal). 2021. *Teori Dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Aceh.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill-Co. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung.
- Eny Kusdarini. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. UNY Press. Yogyakarta.
- Firmansyah Arifin (etal). 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Jakarta.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja (etal). 2018. *Hukum Perundang-undangan*. Uwais Inspirasi Indonesia. Ponorogo.
- Indra Muchlis Adnan. 2019. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Trussmedia Grafika. Yogyakarta.
- Indriyanto Seno Adji (etal). 2016. *Pengujian Oleh Publik (Publik Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta.

- Irwnsyah & Ahsan yunus. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan dan Metode Penulisan Hukum*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- , 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Kaukaba. Yogyakarta.
- Piatur Pangaribuan & Arie Purnomosidi. 2012. *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*. Cakrawala Media. Surakarta.
- Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Roy Marthen Moonti. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Keretakupa. Makassar.
- Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sri Hartini & Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Widayati. 2015. *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Zainal Arifin Mochtar. 2019. *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Pasca-Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers. Depok.

Artikel Ilmiah

- Abdul Kholiq. AF. M. "Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Volume 11 Nomor 26. Mei 2004.
- Andi Bau Inggit AR. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah". Jurnal Restorative Justice. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Volume 3 Nomor 1. 2019.
- Bayu Dwi Anggono. "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya". Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Volume 4 Nomor 1. 2018.
- Cindy Rizka Tirzani Koesoemo. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Lex Crimen. Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Volume 6 Nomor 1. 2017.
- Dola Riza. "Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". Soumatera Law Review. LLDIKTI Wilayah X. Volume 2 Nomor 2. 2019.
- Dwi Haryati & Yulianta Saputra. "Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Peyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Menunjang Penegakan Hukum Anti Korupsi". Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Volume 2 Nomor 1. 2020.
- Efi Yulistyowati. (etal). Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Universitas Semarang. Volume 18 Nomor 2. Desember 2016.
- Enrico Parulian Simanjuntak. "Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". Jurnal Hukum dan Peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Volume 7 Nomor 2. 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

Moh Fadhil. "Komisi Pemberantasan Korupsi. Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi". Jurnal Al-Ahkam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banten. Volume 15 Nomor 2. Desember 2019.

Tjokorda Gde Indraputra & I Nyoman Bagiastra. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Institutions*)". E Journal Ilmu Hukum Kertha Negara. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 2 Nomor 5. Oktober 2014.

Zaelani. "Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation*)". Jurnal Legislasi Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Volume 9 Nomor 1. April 2018.

Surat Kabar/Berita dan Siaran Pers

1.274 Pegawai KPK yang Lolos TWK Segera Dilantik Jadi ASN .
(Kompas Nasional Online).
<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/21/07583431/1274-pegawai-kpk-yang-lolos-twk-segera-dilantik-jadi-asn>

24 Pegawai KPK Dibina Juli, Diminta Buat Surat Pernyataan. (CNN Indonesia Online).
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210615091411-12-654394/24-pegawai-kpk-dibina-juli-diminta-buat-surat-pernyataan>

5 Cacat Hukum Penggunaan Tes Wawasan Kebangsaan KPK:
Merespon Pidato Presiden Joko Widodo atas 75 Pegawai KPK. (Siaran Pers PSHK Online).
<https://pshk.or.id/publikasi/5-cacat-hukum-penggunaan-tes-wawasan-kebangsaan-kpk-merespon-pidato-presiden-joko-widodo-atas-75-pegawai-kpk/>

BKN: 1.271 Pegawai KPK yang Lolos TWK Dilantik 1 Juni.
<https://news.detik.com/berita/d-5582048/bkn-1271-pegawai-kpk-yang-lolos-twk-dilantik-1-juni>

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK... . (Kompas Nasional Online).

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/06/06231921/diikuti-1351-pegawainya-ini-rangkaian-tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk?page=all>

Dua Sisi Tv One “Menunggu Nasib, 75 Pegawai KPK Dibela Jokowi?”

(<https://www.youtube.com/watch?v=gkZmk1BHM8w&t=2259s>)

Ini Penjelasan Kepala BKN soal Hasil TWK Masuk Kategori Rahasia Negara. <https://nasional.tempo.co/read/1473644/ini-penjelasan-kepala-bkn-soal-hasil-twk-masuk-kategori-rahasia-negara/full&view=ok>

KPK-Kemenhan Teken Kerja Sama Diklat Bela Negara untuk Pegawai Lolos TWK. (Tempo Online)

<https://nasional.tempo.co/read/1476613/kpk-kemenhan-teken-kerja-sama-diklat-bela-negara-untuk-pegawai-lolos-twk/full&view=ok>

Pakar Hukum Tata Negara Ini Tidak Setuju TWK Disebut Tak Berdasarkan Hukum.

<https://nasional.sindonews.com/read/437572/13/pakar-hukum-tata-negara-ini-tidak-setuju-twk-disebut-tak-berdasarkan-hukum-1621958709>

Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Seleksi Pegawai ASN KPK sudah Sesuai Prosedur.

<https://www.bkn.go.id/berita/pelaksanaan-asesmen-tes-wawasan-kebangsaan-seleksi-pegawai-asn-kpk-sudah-sesuai-prosedur>

Siaran Pers Badan Kepegawaiaan Negara Mengenai Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi ASN Nomor: 13/RILIS/BKN/V/2021

Siaran Pers Indonesia Corruptin Watch. BKN dan KPK Tertutup Mengenai Informasi TWK Pegawai KPK.

<https://antikorupsi.org/id/article/bkn-dan-kpk-tertutup-mengenai-informasi-twk-pegawai-kpk>

Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara.

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 Tentang Nilai Abang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil